

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPB Bandung.
- Anggara, C. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, Harry dkk. (2014). *Perencanaan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*.

Jurnal :

- Adawiyah, P. (2018). Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Politico*, Vol 18(1), hal 113-129.
- Hadi, I. (2019). Urgensi Aksesibilitas Disabilitas pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al Himayah*, Vol 3(2), Hal 223-245.
- Himawanto, D. A., & Nur, Y., Prajalani, H. (2017, Desember). Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo. *Indonesian Journal of Disability studies (IJDS)*, 04(02), 87-95.
- Kurniawan, E., & Susilowati, I. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas terhadap Kemudahan dalam Beraktivitas di Ruang Publik di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum*, Vol 3(4), Hal 19-26.

Mayarni, Meilani, Zulkarnain. (2018). Kualitas Pelayanan Publik bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 9(1), Hal 11-18.

Pasaribu, P., & Briando, B. (2019). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM sebagai Perwujudan Tata Nilai "Pasti" KEMENKUMHAM. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 10(1).

Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, vol 5(3).

Ridlwan, Z. (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right of Persons with Disabilities). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7(2).

Skripsi :

Nuraviva, L. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*.

Pratama, A. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak atas Sarana Prasarana yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Perpustakaan Yogyakarta. *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*.

Pujiani, I. (2018). Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas (Tunanetra) sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 (Studi Kasus di Taman Tematik Inklusi Kota Bandung). *Skripsi Fakultas Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia*.

Produk Hukum :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman

Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat